

# **SKRIPSI**

## **EFEKTIFITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA KURUNGAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**



**Oleh**

**ARIFANDHI KAHARUDDIN**

**B111 06 621**

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
dalam Bagian Hukum Pidana**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**Pada**

### **PENGESAHAN SKRIPSI**

**EFEKTIFITAS PENERAPAN PIDANA KURUNGAN DAN  
PENJARA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK  
PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa mahasiswa :

Nama : Arifandhi Kaharuddin

Nomor induk : B111 06621

Bagian : Pidana


Judul : Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Kurungan dalam upaya  
untuk menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh anak

Telah diperiksa dan dapat disetujui oleh pembimbing untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, Maret 2013

Mengetahui,

Pembimbing I



Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.  
NIP. 19531124 197912 1 001

Pembimbing II



Nur Azisa, S.H., M.H.  
NIP. 19671010 199202 2 002

## PERSETUJUAN MENEMPUIH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi dari mahasiswa

Diterangkan bahwa mahasiswa :

Nama : Arifandhi Kaharuddin

Nomor induk : B111 06621

Bagian : Pidana

Judul : Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Kurungan dalam upaya  
untuk menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh anak

Telah memenuhi syarat untuk mengikuti ujian skripsi pada Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddia.

Makassar, Mei 2013

A.n. Dekan,

Pembantu Dekan I,



**Prof. DR. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.**

**NIP. 196304191989031003**

## ABSTRAK

**ARIFANDHI KAHARUDDIN (B11106621), Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Kurungan Dalam Upaya Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak, dibimbing oleh Prof. Dr. M.Syukri Akub, S.H., M.HNur Azisa. S.H., M.H**

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui Apakah penjatuhan pidana kurungan efektif untuk menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat didalam penjatuhan pidana kurungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 .

Data yang diperoleh kemudian dianalisis tentang seberapa efektifkah penjatuhan pidana kurungan untuk menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan faktor yang menjadi penghambat didalam penjatuhan pidana kurungan. Serta membandingkan bagaimana tentang teori-teori yang telah tersaji oleh beberapa pakar tentang keefektifitasan pidana kurungan serta faktor-faktor penghambatnya dengan keadaan yang sebenarnya terjadi.

Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta tersebut, maka penulis berkesimpulan antara lain: bahwa penjatuhan pidana penjara/ kurungan terhadap anak menimbulkan dampak negatif dan kerugian khususnya terhadap terpidana anak, diantaranya adalah ; Anak akan terpisah dari keluarganya, anak menjadi lebih ahli tentang kejahatan., anak tersebut diberi cap oleh masyarakat, masyarakat menolak kehadiran mantan terpidana anak masa depan anak menjadi lebih suram. Pada kenyatannya anak yang telah dijatuhi pidana penjara atau kurungan mereka justru tidak menjadi lebih baik dari sebelumnya tetapi justru akan melakukan kembali tindak pidana, maka dari sini dapat dikatakan bahwa ternyata penjatuhan pidana penjara atau kurungan tidaklah efektif dalam upaya menanggulangi kejahatan yang terjadi tetapi justru menimbulkan dampak-dampak yang merugikan bagi anak. Penjatuhan pidana kurungan sendiri masih mengalami beberapa faktor penghambat yakni selain kurang efektifnya pelaksanaan pidana kurungan bagi anak, juga perlu dilakukan pembenahan terlebih dahulu terhadap pelaksana pembina terhadap anak, dan mensterilkan tempat pelaksanaan pembinaan anak dari segala hal yang dapat menghambat proses pembinaan terhadap anak.

Adapun saran yang dapat penulis rekomendasikan yakni dalam penjatuhan jenis pidana yang tidak bersifat penghukuman dan perampasan terhadap kemerdekaan anak merupakan alternatif pidana yang dapat dijatuhkan pada terpidana anak seperti pidana pengawasan, pembinaan, percobaan, denda, ganti rugi, kerja social maupun permohonan maaf dan teguran sehingga dengan demikian akan tercapai tujuan pemidanaan dalam menanggulangi kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
<b>BAB 1      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
<b>BAB 2      TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Hukum Tentang Anak	
1. Pengertian Anak.....	8
2. Hukum Perlindungan Anak.....	18
B. Pidana dan Pemidanaan	
1. Pengertian Pidana.....	24
2. Teori Tujuan Pemidanaan .....	28
3. Pemidanaan Terhadap Anak .....	39
C. Efektifitas Pidana Kurungan .....	41
<b>BAB 3      METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi Penelitian .....	44
B. Jenis dan Sumber Data .....	44
C. Teknik Pengumpulan Data .....	45
D. Analisis Data .....	45
<b>BAB 4      HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Kurungan dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh anak.....	46

B. Faktor menghambat penjatuhan pidana kurungan dalam rangka menangulangi tindak pidana anak .....	66
---	----

## BAB 5 PENUTUP

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran .....	74

DAFTAR PUSTAKA .....	75
----------------------	----



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Seorang anak merupakan harapan dan dambaan bagi setiap orang tua, karena anak merupakan bagian dari generasi muda yang merupakan salah satu sumber daya manusia yang berpotensi yang akan menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa dimana anak juga memiliki peranan strategis dalam memajukan bangsa ini untuk itu mereka memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan social secara utuh serasi dan seimbang .

Terkait dengan hal diatas dalam pembukaan deklarasi hak-hak anak pada alenia 3 ([www.slideshare.net/sahabatkota/hak-anak](http://www.slideshare.net/sahabatkota/hak-anak)) ,disebutkan : “ *where as the child by reason of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth*” dari pernyataan tersebut terkandung makna bahwa karena alasan fisik dan mental yang belum matang dan dewasa, maka anak-anak membutuhkan perlindungan dan serta perawatan khusus termasuk perlindungan hukum sebelum maupun sesudah mereka dilahirkan dari pernyataan tersebut tercermin bahwa setiap orang wajib memberikan yang terbaik bagi anaknya.



Memang disadari bahwa hak-hak anak harus dijamin dan dipenuhi, terutama menyangkut kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Namun dalam kehidupan bermasyarakat, kompleksitas permasalahan menyertai kehidupan anak, baik aspek pendidikan, kesehatan maupun perlakuan yang tidak adil dipandang dari segi hukum, agama maupun moralitas kemanusiaan.

Sebagian besar anak mempunyai kemampuan dalam mengembangkan dirinya untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan bermanfaat untuk sesama manusia. Kondisi fisik dan mental seorang anak yang masih lemah seringkali memungkinkan dirinya disalahgunakan secara legal atau ilegal, secara langsung atau tidak langsung oleh orang sekelilingnya tanpa dapat berbuat sesuatu.

Kondisi buruk bagi anak ini, dapat berkembang terus dan mempengaruhi hidupnya lebih lanjut dalam bernegara dan bermasyarakat. Situasi seperti ini dapat membahayakan negara, karena maju atau mundurnya suatu bangsa itu memperlakukan dan mendidik anak-anaknya. Oleh karena itu, perlindungan anak perlu mendapat perhatian khusus di dalam pembangunan bangsa.

Saat ini banyak dijumpai anak-anak yang berperilaku menyimpang. Perilaku menyimpang anak ini, jelas tampak kini di tengah-tengah masyarakat. Kenyataan-kenyataan ini menunjukkan

bahwa perilaku mereka sudah sangat mengkhawatirkan dan merupakan masalah yang berbahaya. Kenyataan-kenyataan ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya dampak negatif dari arus globalisasi, komunikasi, informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perubahan gaya hidup telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat, terlebih kepada perilaku anak.

Salah satu persoalan yang sering muncul adalah bagaimana penanganan hukum terhadap anak tanpa mengenyampingkan hak-hak dari anak, karena menurut hemat penulis perilaku menyimpang oleh anak ini disebabkan oleh umur yang masih terlalu muda, pertumbuhan batin dan jiwanya masih belum sempurna / labil. Maka dari itu pemberlakuan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Bab III bagian kesepuluh dari Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 telah mencantumkan tentang hak anak, dan dalam pelaksanaan pemeliharaan dan menjaga hak asasi, menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Perlindungan anak dalam segala aspek merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perlindungan hukum terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, tidak lepas dari penjatuhan pidana terhadap anak tersebut.

Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin perkembangan dan pertumbuhan fisik, mental dan sosial anak secara utuh, selaras, serasi dan seimbang. Pemidanaan dalam hal ini adalah bagian dari suatu hukum pidana dan tentu saja memberikan akibat yang negatif bagi yang dikenai pidana. Oleh karena itu, seorang anak yang mendapatkan hukuman pidana berupa pemidanaan, maka hakim haruslah menggunakan dasar pertimbangan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebelum menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak.

Perlindungan terhadap hak-hak anak secara umum mencakup pula didalamnya perlindungan hak-hak anak bermasalah baik secara fisik, mental maupun perilaku anak yang menyimpang / deviant atau perilaku yang mengarah pada tindak kriminal, dan berbicara masalah hak anak yang bermasalah hal ini sering dikaitkan dengan masalah perilaku anak yang dalam kadar tertentu berbentuk perilaku yang menyimpang atau perilaku yang mengarah pada terjadinya tindak kriminal beserta latar belakangnya termasuk usaha-usaha penanggulangan terhadap perilaku tersebut.

Menurut H.L Packer (Barda Nawawi A, 1996: 17) bahwa usaha pengendalian perbuatan anti social dengan pengenaan hukum pidana, merupakan problem social yang memiliki dimensi hukum yang penting artinya , sampai saat ini masih dipersoalkan peranannya karena

dengan mengandalkan pemberian pidana tidak akan dapat menumbuhkan suatu kesadaran yang tumbuh dalam diri seseorang, justru dengan pidana efek yang timbul hanyalah perasaan takut saja akan hukuman yang akan dijatuhkan.

Didalam usaha untuk menanggulangi kejahatan pada umumnya terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan salah satunya adalah melalui upaya penal yakni dengan menggunakan sarana hukum pidana yang umumnya terdapat dalam pasal 10 KUHP yang salah satunya adalah pidana penjara. Begitu pula terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kejahatan dimana penjatuhan pidana penjara terhadap anak merupakan salah satu penerapan dari jenis pidana yang dikenal dalam hukum pidana kita, yang dilakukan dalam upaya untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi.

Dalam sejarah perkembangan penjatuhan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku kejahatan dalam hukum pidana, sangat terkait dengan nilai budaya yang hidup dan berkembang pada suatu waktu. seperti halnya dengan adanya pandangan terhadap batas usia minimal anak untuk dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum. hal ini menunjukkan adanya anggapan dasar yang humanities dan merupakan wawasan filosofis dari suatu masyarakat..

Berdasarkan uraian di atas maka Penulis terdorong untuk mengkaji tentang penerapan pidana pokok berupa denda yang dijatuhkan kepada Anak Nakal akan membahasnya secara ilmiah

yang nantinya tertuang dalam skripsi dengan judul **Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Penjara dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh anak .**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas , maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu:

1. Seberapa besar efektifitas penjatuhan pidana penjara terhadap anak dalam upaya untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi?
2. Apakah yang menjadi motifasi dalam pertimbangan hakim sehingga di pilih hukuman kurungan sebagai faktor-faktor penghambat di dalam penjatuhan pidana kurungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis dapat mengemukakan tujuan penelitian adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui Seberapa besar efektifitas penjatuhan pidana penjara terhadap anak dalam upaya untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat di dalam penjatuhan pidana kurungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 .

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung dalam penggunaannya secara teoritis dan secara praktis, yang mana manfaat tersebut adalah :

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan masukan bagi pelaksanaan penelitian di bidang yang sama untuk masa mendatang pada umumnya dan masukan serta sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya pada Hukum Pidana.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Memberikan informasi secara ilmiah bagi masyarakat umum sehingga diharapkan dapat lebih mengetahui dan mengerti tentang sistem pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dan sejauh mana efektifitas penerapan sanksi pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak kejahatan serta faktor-faktor penghambat dalam penerapan penjatuan pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Pidana dan Pemidanaan**

##### **1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan**

Sebelum membicarakan jenis-jenis pidana yang dikenal orang dalam hukum pidana Indonesia, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan pidana itu sendiri.

Kata – kata hukum pidana merupakan kata-kata yang mempunyai lebih dari pada satu pengertian, maka dapat dimengerti bahwa tidak ada satupun rumusan diantara rumusan-rumusan yang ada, yang dapat dianggap sebagai rumusan yang sempurna yang dapat diberlakukan secara umum. Hukum pidana sebagai hukum publik yakni hukum yang mengatur antar warga negara dengan negara dimana fungsi dan peranan negara melalui badan dan aparat penegak hukumnya terlibat langsung dalam menjalankan sanksi/ ancaman hukumnya bagi setiap pelanggaran hukum.

Hukum pidana yang menurut sejarahnya yang diwariskan oleh pemerintah Belanda dan dibawa ke Indonesia pada tanggal 4 Mei 1917 (*staatblad 1917 no.497*) yang dikenal sebagai W.v.S (*Wetboek van Strafrecht voor Nederland-Indie*), berdasarkan Undang – undang (selanjutnya disingkat UU) Nomor 1 Tahun 1946 diberlakukan secara positif dan efektif di Indonesia setelah kemerdekaan RI yang sekarang



dikenal dengan nama Kitab Undang - undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) atau hukum pidana materil. (L.J. Van Apeldoorn, 2008 : 339). Sebagai contoh dapat dikemukakan rumusan mengenai pengertian hukum pidana yang telah dibuat oleh W.L.G. LEMAIRE (P.A.F. Lamintang, 1997 : 1) yaitu :

“ norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang ( boleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus”.

Menurut Van Hamel ( P.A.F. Lamintang, 1984 : 47 ) arti Pidana atau *straf* menurut hukum positif dewasa ini:

“ suatu penderita yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seseorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum harus ditegakkan oleh negara”.

Menurut Simons (Moeljatno, 2002 : 7), hukum pidana atau *straf* adalah :

“kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barangsiapa yang tidak menaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan –aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut”.

Dari tiga rumusan mengenai pidana di atas dapat diketahui, bahwa pidana itu hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka dan ini berarti bahwa pidana itu bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mencapai tujuan.

Pada umumnya jika orang menyebut delik, biasanya yang mereka maksudkan adalah delik pidana saja, tetapi, menurut Achmad Ali (2002 : 251), delik bukan hanya delik pidana, melainkan juga ada delik perdata atau privat, dimana pengertian delik adalah :

“ pengertian umum tentang semua perbuatan yang melanggar hukum ataupun undang-undang dengan tidak membedakan apakah pelanggar itu dibidang hukum privat ataupun hukum publik, termasuk hukum pidana”.

Adapun unsur-unsur atau ciri-ciri pidana menurut Dwidja Priyatno (2006 : 7) ialah sebagai berikut :

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nesatapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang atau Badan Hukum (korporasi) yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Seorang ahli hukum lain memberiuken pengertian luas terhadap hukum pidana, misalnya Moeljatno ( Bambang Waluyo, 2008 ; 7) mengemukakan bahwa hukum pidana adalah sebagai berikut :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Apabila kita telah maka rumusan pada huruf c diatas menunjuk pada pengertian hukum pidana formil, atau lazim disebut hukum acara pidana. Pada umumnya hukum pidana materil diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) dan hukum pidana formil diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHPA). Namun, adakalanya dalam suatu perundang-undangan diatur hukum materil dan formil yang lazim disebut dengan hukum pidana khusus atau ada yang menyebut perundang-undangan pidana khusus.

Menurut Molejatno (Rusli Muhammad, 2007 : 1) Hukum Pidana formil (hukum acara pidana) adalah :

“ bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara apa dan prosedur macam apa, ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan delik tersebut”.

Selanjutnya menurut Van Bammelen ( Andi Hamzah, 2006 : 8-9) fungsi hukum acara pidana sebagai berikut :

1. Mencari dan menemukan kebenaran ;
2. Pemberian keputusan oleh hakim ;
3. Pelaksanaan keputusan.

Setelah dijelaskan mengenai pengertian pidana dan hukum acara pidana kemudian akan dijelaskan pengertian pembedaan sendiri. Menurut Sudarto (P.A.F. Lamintang, 1984 : 49), perkataan

pemidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman.

Yang beliau jelaskan sebagai berikut :

“ penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Penetapan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidan oleh hakim”.

## **2. Tujuan Pemidanaan**

Tujuan pemidanaan Menurut Lamintang (1984 : 23), adalah sebagai berikut :

“Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu :

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri ;
- b. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan, dan ;
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi”.

Adapun dasar pembenaran dan tujuan pemidanaan menurut Hermien Hadiati Koeswati (1995 : 78) pada umumnya dibagi dalam 3 (tiga) kelompok teori, yaitu :

### **1. Teori Absolut Atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)**

Tokoh-tokoh terkenal yang mengemukakan teori pembalasan ini antara lain adalah Kant dan Hegel. Kant dan Hegel menganggap bahwa hukuman itu adalah suatu akibat dilakukannya suatu kejahatan.

Oleh karena telah, melakukan kejahatan maka harus dihukum. Hukuman itu bersifat mutlak bagi yang melakukan kejahatan. Semua perbuatan yang berlawanan dengan keadilan harus menerima pembalasan. Manfaat hukuman bagi masyarakat bukanlah hal yang menjadi pertimbangan tetapi hukuman harus dijatuhkan.

Menurut Kant (Lamintang 1984 : 25) mengemukakan bahwa :

“Dasar pembenaran dari suatu pidana terdapat di dalam apa yang disebut *kategorishen imperatif* yang menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu merupakan suatu keharusan yang bersifat mutlak, sehingga yang semata-mata didasarkan pada suatu tujuan itu harus dikesampingkan”.

Dari teori tersebut di atas, jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika. Setiap kejahatan harus disusul dengan pidana.

Sejalan dengan itu, Leo Polak ( A. Hamzah, 1993 : 32) menjelaskan bahwa :

“Menurut etika spinoza, tiada seseorang pun boleh membuat keuntungan karena kejahatan yang telah dilakukan (*ne malis ex pediat esse malos*)”.

Selanjutnya Leo Polak ( A. Hamzah, 1993 : 33) menambahkan bahwa pidana harus memenuhi 3 (tiga) syarat :

1. Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika, yaitu sah bertentangan dengan kesusilaan dan tata hukum obyektif.
2. Pidana hanya boleh memperlihatkan apa yang sudah terjadi. Hukuman tidak dapat dijatuhkan dengan suatu maksud prevensi.
3. Beratnya hukuman harus seimbang dengan beratnya delik, hal ini perlu supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil.

Dari pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa dasar dijatuhkannya hukuman itu tidak lain karena itu sendiri. Adapun akibat

positif maupun negatif dari pemidanaan itu bukanlah merupakan tujuan. Tujuan sebenarnya adalah penjara atau penderitaan.

## 2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Para pengajar teori relatif ini tidak melihat hukuman itu sebagai pembalasan, dan karena itu tidak mengakui bahwa hukuman itu sendirilah yang menjadi tujuan penghukuman, melainkan hukuman itu adalah suatu cara untuk mencapai tujuan yang daripada pemidanaan itu sendiri. Hukuman, dengan demikian mempunyai tujuan, yaitu untuk melindungi ketertiban. Para pengajar teori relatif itu menunjukkan tujuan hukuman sebagai usaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dengan demikian maka hukuman itu mempunyai dua sifat, yaitu sifat prevensi umum dan sifat prevensi khusus. Pada prevensi umum, orang akan menahan diri untuk melakukan kejahatan, sedangkan pada prevensi khusus, para penganjurnya menitikberatkan bahwa hukuman itu bertujuan untuk mencegah orang yang telah dijatuhi hukuman untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Selanjutnya bagi mereka yang hendak melakukan pelanggaran akan mengurungkan maksudnya sehingga pelanggaran tidak dilaksanakan.

Van Bammelen (1998 : 27-28) memberi 3 teori relatif yaitu :

- a. Prevensi umum, tujuan pemerintah menjatuhkan pidana adalah untuk mencegah rakyat pada umumnya melakukan kejahatan. Adapun fungsinya adalah:
  1. Menegakkan wibawa pemerintah.
  2. Menegakan hukum.
  3. Membentuk norma.

- b. Prevensi khusus, pidana adalah pembenaran yang terpenting dari pidana itu sendiri. Pelaku menyadari akibat dari perbuatannya itu sendiri menimbulkan penderitaan. Jadi pidana berfungsi mendidik atau memperbaiki.
- c. Fungsi perlindungan, bahwa dengan pidana pencabutan kebebasan selama waktu tertentu, masyarakat telah terhindar dari sasaran kejahatan, yang mungkin dilakukan jika seandainya ia tidak dihukum.

### 3. Teori Gabungan/Modern (*vereningings theorien*).

Teori gabungan atau teori modern merupakan kombinasi teori absolut dan teori relatif. Teori ini mensyaratkan bahwa pembedaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pembedaan dan pendidikan.

Teori ini diperkenalkan oleh Prinst, Van Hammel, Van List, (Prakoso, 1984 : 47) pandangan sebagai berikut :

- a. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- b. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologis dan sosiologis.
- c. Pidana ialah cara yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Keseluruhan teori dan pandangan dari para pakar, realitas di masyarakat menunjukkan dalam kondisi dan komunitas tertentu instrumen pidana tidak dapat memberi fungsi preventif diduga ada kejadian tindak pidana yang menjadi faktor pemicu terjadinya pelanggaran.



Adapun tujuan pemidanaan dalam pasal 51 Rancangan KUHP 2004 (Dwidja Priyanto, 2006 : 28-29) adalah sebagai berikut :

- a. Mencegah dilakukan tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

### **3. Jenis-jenis pidana**

Apabila berbicara mengenai bentuk pidana yang dijatuhkan utamanya mengacu pada KUHP. Namun untuk hukum pidana khusus, ternyata ada perluasan atau penambahan bentuk atau jenis pidana tambahan diluar yang termaktub dalam KUIHP.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menetapkan jenis-jenis pidana yang termaktub dalam Pasal 10. Dibedakan dua bentuk pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas empat jenis pidana, dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana. Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut :

#### **I. Pidana Pokok, meliputi :**

- a. Pidana Mati
- b. Pidana Penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana Denda

## **II. Pidana Tambahan, meliputi :**

- a. Pencabutan beberapa hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

Adapun penjelasan dari jenis-jenis pidana sebagai berikut :

Pidana pokok :

1) Pidana mati adalah pidana yang terberat dari semua jenis pidana karena dicabutnya hak untuk hidup. Adapun kejahatan yang diancam pidana mati menurut R. Susilo (Bambang Waluyo, 2008 : 13) adalah :

- a. Makar, membunuh Kepala Negara (Pasal 24 KUHP)
- b. Mengajak negara asing guna menyerang Indonesia (Pasal 3 ayat (2) KUHP).
- c. Memberi pertolongan kepada musuh waktu Indonesia dalam keadaan perang (pasal 124 ayat (3) KUHP).
- d. Membunuh Kepala Negara Sahabat (Pasal 140 ayat (3) KUHP).
- e. Pembunuhan berencana (pasal 140 ayat (3) dan pasal 340 KUHP).
- f. Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih berkawan, pada waktu malam atau dengan jalan membongkar dan sebagainya, yang menjadikan ada orang yang terluka berat atau mati (Pasal 365 ayat (4) KUHP)
- g. Pembajakan di laut, di pesisir, di pantai dan kali, sehingga ada orang mati (Pasal 444 KUHP).
- h. Pada waktu perang menganjurkan huru-hura, pemberontakan dan sebagainya (Pasal 124 KUHP)
- i. Pemerasan dengan pemberataan (Pasal 368 ayat (2) KUHP).

2) Pidana Penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal 1 hari sampai pidana penjara seumur hidup. Pidana seumur hidup tercantum dimana ada ancaman pidana mati (pidana mati atau seumur hidup atau penjara dua puluh tahun). Jadi pada umumnya pidana penjara maksimum ialah 15 tahun. Pengecualian terdapat diluar KUHP, yaitu Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 3 Tahun 1971), maksimum ialah pidana penjara seumur hidup. Begitu pula Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (A.Z. Abidin dan A. Hamzah, 2002 : 328,329).

Menurut Barda Nawawi Arif ( 2002 : 224), efektifitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Bahwa yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat), sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan

si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.

1) Efektifitas Pidana Penjara Dilihat dari Aspek Perlindungan Masyarakat.

Dilihat dari aspek perlindungan / kepentingan masyarakat maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah dan mengurangi kejahatan. Jadi, kriteria efektifitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum (*general prevention*) dari pidana penjara dalam mencegah masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan.

2) Efektifitas Pidana Penjara Dilihat dari Aspek Perbaikan si Pelaku.

Dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektifitas terletak pada aspek pencegahan khusus (*special prevention*) dari pidana. Jadi, ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/terpidana.

Menurut Barda Nawawi Arief (2002 : 225, 229, 230), berdasarkan masalah-masalah metodologis yang dikemukakan di atas dapatlah dinyatakan, bahwa penelitian-penelitian selama ini belum dapat membuktikan secara pasti apakah pidana

penjara itu efektif atau tidak. Terlebih masalah efektifitas pidana sebenarnya berkaitan dengan banyak faktor.

3) Pidana kurungan adalah bentuk pidana yang mirip dengan pidana penjara, tetapi pidana ini jangka waktunya lebih pendek daripada pidana penjara. Pidana kurungan ini terdiri dari dua macam yaitu pidana kurungan prinsipal dan kurungan subsidair (pengganti denda). Kurungan prinsipal lamanya minimum 1 hari dan maksimum 1 tahun dapat ditambah menjadi 1 tahun 4 bulan dalam hal-hal : gabungan kejahatan ulangan kejahatan dan peraturan dalam Pasal 52 KUHP. Kurungan subsidair (pengganti denda) lamanya minimum 1 hari maksimum 6 bulan, dapat ditambah sampai 8 bulan, dalam hal-hal : gabungan kejahatan dan ulangan kejahatan serta peraturan dalam Pasal 52 KUHP.

4) Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara. Pidana denda dijatuhkan terhadap delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan jika terdakwa tidak mampu membayar pidana denda.

Efektifitas pemidanaan diartikan sebagai tingkat tercapainya tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan. Suatu

pemidanaan dikatakan efektif apabila tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan itu tercapai.

Menurut Niniek Suparni (2007 : 62-63) untuk memaksa atau menimbulkan tekanan agar orang yang dijatuhi pidana denda mau membayar denda, maka dapat ditempuh jalan yaitu sebagai berikut:

1. Mengaktifkan fungsi Kejaksaan sebagai eksekutor, yang juga merupakan Pengacara Negara untuk melakukan gugatan perdata terhadap orang yang tidak mau membayar denda. Sehingga dalam fungsi dan kedudukan sebagai penggugat dapat memohon dilakukannya "*conservatoir beslaag*" terhadap barang-barang milik terdakwa (sebagai tergugat) tidak terbatas terhadap barang-barang yang terkait langsung dengan kejahatann tau pelanggaran yang dilakukan akan tetapi juga terhadap barang-baranglainnya milik terdakwa.
2. Melaksanakan secara konsekuen pidana, yang dalam KUHP berupa pidana pengganti denda, yang dalam KUHP sekarang berupa pidana kurungan, atau dalam konsep rancangan KUHP berupa pidana pengawasan atau pidana kerja sosial.

Ditinjau dari segi efektifitasnya maka pidana menjadi kurang efektif apabila ditinjau dari segi penjeraannya terhadap terpidana. Hal ini disebabkan karena pidana denda dapat dibayarkan oleh orang lain. Sedangkan dalam hal pidana penjara tidak mungkin

diwakilkan oleh orang lain. Disamping itu terpidana dapat saja mengumpulkan uang dari mana saja untuk melunasi/membayar denda tersebut.

Pidana tambahan :

1. Pencabutan beberapa hak tertentu ialah suatu pidana dibidang kehormatan. Menurut Vos (S.R. Sianturi, 1998). Adapun hak-hak yang dapat dicabut yaitu :
  - a. Hak untuk menjabat segala jabatan tertentu.
  - b. Hak untuk masuk Kekuasaan Angkatan Bersenjata.
  - c. Hak dipilih aktif maupun pasif anggota DPR pusat dan daerah, serta dalam pemilihan lain-lainnya menurut undang-undang atau peraturan umum.
  - d. Hak untuk menjadi penasehat, wali dan lain-lain.
  - e. Hak kuasa bapak dan sebagainya
  - f. Hak untuk melakukan pekerjaan tertentu.
2. Perampasan barang-barang yang tertentu adalah mencabut hak milik atau suatu barang dari orang yang mempunyainya dan barang itu dijadikan milik pemerintah. Barang-barang ini menurut pasal 39 KUHP dapat dibedakan atas dua macam yaitu :
  - a. Barang-barang (termasuk pula binatang) yang diperoleh dengan kejahatan misalnya uang palsu. Sedangkan apabila diperoleh dengan pelanggaran, barang-barang itu hanya



dirampas dalam hal-hal tertentu saja, misalnya pasal 549 (2), 529 (2), 502 (2) dan sebagainya.

b. Barang-barang (termasuk pula binatang) yang dengan sengaja dipakai melakukan kejahatan misalnya senjata api yang dipakai untuk membunuh.

3. Pengumuman putusan hakim yaitu putusan yang disebarakan secara khusus akan disiarkan lagi sejelas-jelasnya dengan cara yang ditentukan oleh hakim, misalnya melalui siaran televisi, radio, surat kabar dan sebagainya. Semuanya ini atas ongkos orang yang dihukum yang dapat dipandang sebagai suatu pengecualian, bahwa pada umumnya penyelenggaraan hukum itu harus dipikul oleh negara.

## **B. Efektifitas Pidana Penjara**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2005 : 119) W.J.S. Poerwadarminta dinyatakan bahwa “Efektifitas” berarti mulai berlaku, dapat membawa hasil, berhasil guna, atau ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya atau kesannya).

## **Pengertian Perlindungan Hukum**

Sebelum memaparkan tentang apa itu perlindungan hukum, penulis akan mengartikan secara terpisah tentang “perlindungan” dan “hukum”.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2005 : 269) W.J.S. Poerwadarminta dinyatakan bahwa pengertian Perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.

Pengertian perlindungan sendiri dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.

Sedangkan, menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto (roesli effendy, 1989 : 37) berpendapat bahwa hukum adalah Peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.

Menurut R. Soeroso (1993 : 19) , bahwa :

hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.

Mochtar Kusumaatmadja (1994 : 10) mengemukakan bahwa :

pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.

Jadi menurut penulis pengertian perlindungan hukum sendiri adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Secara khusus perlindungan hukum bagi anak sendiri mempunyai spektrum yang cukup luas. Menurut Barda Nawawi Arief ( 1998:156) dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu:

- a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
- b. Perlindungan anak dalam proses peradilan;
- c. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial);
- d. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
- e. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlakuk anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya);
- f. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan;
- g. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata;
- h. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

Lanjut Barda Nawawi Arief (1985 : 156) mengemukakan bahwa:

perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

## C. Tinjauan Hukum Tentang Anak

### 1. Pengertian Anak

Secara umum peraturan perundang-undangan di berbagai negara terutama pada pendekatan usia tidak ada keseragaman perumusan tentang anak. Terkait dengan itu, maka Suryana Hamid (2004:21) menguraikan bahwa di Amerika, batas umur anak delapan sampai delapan belas tahun. Di Australia disebut anak apabila berumur minimal 8 tahun dan maksimal 16 tahun. Di Inggris batas umur anak 12 tahun dan maksimal 16 tahun, sedangkan di Belanda yang disebut anak adalah apabila umur antara 12 sampai 18 tahun, demikian juga di Srilangka, Jepang, Korea, Filipina, Malaysia dan Singapura.

Selanjutnya *Task Force on Juvenile Delinquency Prevention* menentukan bahwa batas umur anak yang bisa dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana adalah berumur 10 sampai 18 tahun. Resolusi PBB Nomor 40/33 tentang *Standard Minimum Rule for the Administration of Juvenile Justice*, menentukan batas umur anak 7 sampai 18 tahun.

Bila bertitik tolak dari laporan penelitian Katayen H Cama (Lilik Mulyadi, 2005:16-17) batas umur minimal bervariasi dari umur 7 – 15 tahun. Hal ini dipertegas dengan redaksional sebagai berikut:

Bahwa dalam tahun 1953 berdasarkan laporan *Katayen H. Cama*, Hakim Pengadilan Anak Bombay, India yang mengadakan research untuk Departemen Sosial dari Perserikatan Bangsa-bangsa atas permintaan *Social Commision* dari *Economic and Social Council* menyatakan, bahwa:

- Di Bima, Ceylon dan Pakistan, seorang anak di bawah usia 7 tahun dianggap tidak melakukan kejahatan;
- Di Jepang, tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak kurang dari 14 tahun tidak dapat dihukum;
- Di Filipina, anak-anak di bawah 9 tahun, dan di Muangthai anak-anak di bawah 7 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara kriminal;
- Di Bima, Ceylon dan Pakistan, seorang anak di antara umur 7 tahun dan di bawah 12 tahun dan Filipina seorang anak di antara umur 9 tahun dan di bawah 15 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, apabila ia pada waktu melakukannya belum dapat menghayati bahwa apa yang dilakukannya adalah salah.

Sedangkan untuk batasan umur maksimum 18 tahun dirasakan cukup representatif dengan kebanyakan hukum positif Indonesia (UU 1/1974, UU 12/1995, UU 3/1997) serta juga identik pada ketentuan umur di 27 Negara Bagian Amerika Serikat, kemudian Negara Kamboja, Taiwan, Iran serta sesuai dengan ketentuan Pasal 1 *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak) dari Sidang Majelis Umum PBB yang diterima tanggal 20 November 1989 dan di Indonesia disahkan dengan Keputusan Presiden RI Nomor: 36 Tahun 1990 (LNRI Tahun 1990 Nomor 57) tanggal 25 Agustus 1990.

Berbagai batas umur seperti diuraikan di atas, nampak ada kesamaan antara negara-negara yakni disebut anak apabila batas minimal berumur 7 tahun dan batas maksimal 18 tahun, walaupun demikian ada juga negara yang mematok usia anak terendah 6 tahun dan tertinggi 20 tahun, seperti Iran dan Srilangka. Perbedaan ini dapat

saja terjadi karena adanya perbedaan pandangan yang disebabkan oleh kondisi sosial budaya masyarakat dari negara tersebut.

Di Indonesia ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak, misalnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan masalah anak.

Menurut Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak menyatakan sebagai berikut:

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Anak nakal adalah: a. Anak yang melakukan tindak pidana, b. Anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan tapi juga dapat di telaah dari sisi pandang sentralistis kehidupan. Sepertinya agama, hukum, dan

sosiologi yang menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan social.

Dalam kamus bahasa Indonesia (Poerwadarminta,1984:30) memberi pengertian anak sebagai berikut :

- a. Keturunan yang kedua,
- b. Manusia yang masih kecil,
- c. Orang yang berasal dari atau dilahirkan di (negeri atau daerah), untuk orang yang termasuk dalam suatu golongan pekerjaan (keluarga atau sebagainya).

Masalah anak atau dengan kata lain adalah belum dewasa sering dipakai untuk menunjukkan keadaan dimana seseorang secara yuridis atau secara hukum belum mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan. Anak diletakkan dalam Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak menjadi objek dan subjek yang utama dari proses legitimasi, generalisasi, dalam sistematika dari system hukum positif yang mengatur tentang anak.

Pengertian anak ditinjau dari segi agama Islam ( Maulana Hasan Wadong, 2000:5):

“anak diasosiasikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang lahir dan berkedudukan mulia, yang keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi pada kehendak Allah SWT ”.

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig / person under age*), orang yang



dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid / inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*). Abdussalam ( 2007 : 5) mengemukakan bahwa :

Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Perbedaan pengertian anak tersebut dapat kita lihat pada tiap aturan perundang-undangan yang ada pada saat ini. Misalnya pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

Pengertian anak masih merupakan masalah aktual dan sering menimbulkan kesimpangsiuran pendapat diantara para ahli hukum, salah satu diantaranya adalah berapa maksimum batas umur anak yang ditentukan bagi seorang anak.

Menurut UUD 1945, pengertian anak atau kedudukan anak yang ditetapkan terdapat dalam kebijaksanaan Pasal 34. Pasal ini mempunyai makna khusus terhadap pengertian dan status anak dalam bidang politik, karena yang menjadi esensi dasar kedudukan anak dalam kedua pengertian ini, yaitu anak adalah subjek hukum dari system hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Pengertian anak menurut UUD 1945 dan pengertian politik melahirkan atau menonjolkan hak-hak yang harus diperoleh anak dari masyarakat bangsa dan Negara.

Kaitannya dengan ketentuan tersebut, Aristoteles (Sofyan S. Willis, 1987:22) membagi tiga fase perkembangan manusia adalah sebagai berikut :

- a. 0-7 tahun adalah masa anak-anak
- b. 7-14 tahun adalah masa sekolah
- c. 14-21 tahun adalah masa remaja/puber

Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak antara lain diatur pada :

1. Pasal 1 butir 1, berbunyi “anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 9delapan tahun) tetapi belum mancapai umur 18 (delapan belas tahun) dan belum pernah kawin”.
2. Pasal 2, berbunyi “pengadilan anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum”.
3. Pasal 3, berbunyi “sidang pengadilan anak yang selanjutnya disebut sidang anak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam undang-undang”.

Menurut Soepomo (Maulana Hasan Wadong, 2000:25) yang mengemukakan ciri-ciri kedewasaan adalah sebagai berikut:

1. Dapat bekerja sendiri
2. Cakap dan bertanggung jawab dalam masyarakat
3. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri

4. Telah menikah
5. Berusia 21 tahun

Lain halnya pendapat Romli Atmasasmita (1992:340), bahwa:

“Selama di tubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan orang itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai”.

Jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 20 (dua puluh) tahun untuk anak laki-laki.

Zakiah Darajat (Abdussalam, 1983:10), mengemukakan bahwa :

Masa Sembilan tahun antara 13 dan 21 tahun sebagai masa anak dan masa dewasa, dimana anak-anak mengalami pertumbuhan yang cepat disegala bidang dan mereka bukan lagi anak-anak baik bentuk badan, sikap cara berpikir dan bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa”.

Sementara itu batas usia anak, bertolak pada masa remaja, sebagaimana yang dimaksud oleh Arif Gosita (1985 : 2) bahwa :  
“Remaja merupakan masa peralihan antara anak dan masa dewasa antara 12 tahun sampai 21 tahun.”

Pada Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Anak dalam makna sosial lebih mengarahkan pada perlindungan kodrati karena keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai wujud untuk berekspresisebagaimana orang dewasa. Faktor keterbatasan kemampuan dikarenakan anak berada dalam proses pertumbuhan, proses belajar, dan proses sosialisasi diri akibat usia yang belum dewasa, kemampuan daya nalar dan kondisi fisik dalam pertumbuhan atau mental spiritual yang berada dibawah kelompok usia dewasa.

Pengertian anak memiliki aspek yang sangat luas. Berbagai makna terhadap anak, dapat diterjemahkan untuk mendekati anak secara benar menurut kepentingan agama, hukum, sosial dari masing-masing bidang.

Istilah anak sudah tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari dan bahkan hampir tiap hari didengar. Mungkin saja dengan mudah mendefinisikan kata “anak” tetapi akan lain halnya apabila pernyataan yang sama dilontarkan dalam hukum. Justru kata “anak” sering kali menjadi permasalahan dalam menerjemahkan baik itu bagi para pakar hukum, lembaga-lembaga hukum, maupun dalam suatu teks undang-undang yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dengan beraneka ragamnya definisi/pengertian dari kata anak. Sekarang, dapat dilihat dan dipelajari banyaknya pendefinisian kata anak yang berbeda-beda unsur dan sumbernya, antara lain :

1. Menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), adalah yang berumur di bawah 16 tahun. Sementara ditinjau dari batasan anak dalam KUHP sebagai korban kejahatan sebagaimana Bab XIV ketentuan Pasal 287, 290, 292, 294 dan 295, maka anak adalah yang berumur kurang dari 15 tahun. Namun, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka Pasal-Pasal 45, 46, 47 KUHP tidak berlaku lagi.
2. Menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Stbd 1874 Nomor : 23) adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum pernah menikah. Ketentuan ini juga sejalan dengan definisi menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Menurut Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Sementara menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
4. Menurut Pasal 171 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), adalah seseorang yang belum berusia 15 tahun dan belum pernah menikah.

5. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan.
6. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.

Definisi anak seperti yang telah penulis paparkan di atas, maka batasan anak yang akan dipakai penulis dalam skripsi ini adalah batasan anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Dari definisi anak tersebut, maka tampak pengaturan hukum di Indonesia khususnya yang mengatur tentang batasan umur seorang anak sangatlah bervariasi. Hal ini dikarenakan belum ada ketegasan dalam memberikan perlindungan anak secara utuh baik itu di tingkat peradilan, maupun di lembaga-lembaga pemerintahan. Jika dalam pandangan hukum positif pengaturan hukum tentang anak masih bervariasi, sudah tentu pandangan para ahli/sumber lainnya juga ikut bervariasi.

## **2. Hukum Perlindungan Anak**

Pentingnya masa depan seorang anak bagi suatu Negara untuk meneruskan cita-cita bangsa sehingga masalah perlindungan bagi anak merupakan masalah yang sangat penting untuk selalu

diperhatikan oleh seluruh elemen dari suatu Negara. Perlindungan anak merupakan suatu usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di masa yang akan datang.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.

Perlindungan terhadap anak harus meliputi semua aspek kehidupan. Baik yang bersifat yuridis maupun bersifat non-yuridis. Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak/remaja oleh Prayuna Pusat tanggal 30 Mei 1977 (Irma Setyowati Soemitro, 1990 : 19) , terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak, yaitu :

Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.

Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perseorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Perlindungan Anak ditentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup,

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak juga dapat diartikan sebagai salah satu upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya. ([www.scribd.com/doc/14554325/Nurkholijah-Lubis](http://www.scribd.com/doc/14554325/Nurkholijah-Lubis)).

Arif Gosita ( 1989 : 52 ) berpendapat bahwa “perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.”

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Sehubungan dengan hal ini, Abdul Hakim Garuda Nusantara (Maidin Gultom, 2006 : 53) berpendapat bahwa :

“Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bias didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.”

Maidin Gultom ( 2006 : 36) mengemukakan bahwa :

Pengertian perlindungan anak juga dapat diartikan sebagai : (a) suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan sosial, yang merupakan dasar utama



perlindungan anak; (b) suatu usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif; (c) suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Menurut proporsi yang sebenarnya, secara dimensional perlindungan anak beraspek mental, fisik, dan sosial, hal ini berarti bahwa pemahaman, pendekatan, dan penanganan anak dilakukan secara *inegratif, interdisipliner, intersektoral, dan interdepartemental*; (d) suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu, akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhinya; (e) suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu; (f) dapat merupakan suatu tindakan hukum yang dapat mempunyai akibat hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum; (g) harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa; (h) merupakan suatu bidang pembangunan hukum nasional.

Lain halnya menurut Barda Nawawi Arief (1998:155) yang berpendapat bahwa :

perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Lanjut Barda Nawawi Arief ( 1998:156), ia mengemukakan bahwa :

Perlindungan hukum bagi anak mempunyai spektrum yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu: (a) perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak; (b) perlindungan anak dalam proses peradilan; (c) perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial); (d) perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan; (e) perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlakuk anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya); (f) perlindungan terhadap anak-anak jalanan; (g) perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata; (h) perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

Kesejahteraan merupakan hak setiap anak tanpa terkecuali. Maksudnya adalah bahwa setiap anak baik itu anak dalam keadaan normal maupun anak yang sedang bermasalah tetap mendapatkan prioritas yang sama dari pemerintah dan masyarakat dalam memperoleh kesejahteraan tersebut.

Menurut Paulus Hadisuprpto (Barda Nawawi Arief 1998 : 127 ) berpendapat bahwa :

Kesejahteraan anak merupakan orientasi utama dari perlindungan hukum. Secara umum, kesejahteraan anak tersebut adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Kondisi anak dewasa ini yang sangat mengkhawatirkan seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah dan masyarakat. Realita menunjukkan bahwa kesejahteraan anak untuk saat ini, nampaknya masih jauh dari harapan. Seperti yang telah diketahui bersama bahwa tidak sedikit anak yang menjadi korban kejahatan dan dieksploitasi dari orang dewasa, dan tidak sedikit pula anak-anak yang melakukan perbuatan menyimpang, yaitu kenakalan hingga mengarah pada bentuk tindakan kriminal, seperti narkoba, minuman keras, perkelahian, pengrusakan, pencurian bahkan bisa sampai pada melakukan tindakan pembunuhan.

Gatot Supramono ( Maidin Gultom 2006:40) mengemukakan bahwa :

Perilaku menyimpang yang dilakukan anak ini disebabkan oleh beberapa faktor internal maupun eksternal dari si anak, di antaranya adalah perkembangan fisik dan jiwanya (emosinya) yang belum stabil, mudah tersinggung dan peka terhadap kritikan, serta karena disebabkan pengaruh lingkungan sosial di mana anak itu berada

Perilaku menyimpang anak-anak tersebut (atau yang disebut juga dengan *delinquency*) tidak dapat dipandang mutlak sama dengan perbuatan menyimpang yang dilakukan orang dewasa. Meskipun pada prinsipnya jenis perbuatannya sama, namun tingkat kematangan fisik dan emosi anak masih rendah, dan masa depan anak seharusnya dapat menjadi pertimbangan dalam hal menentukan perlakuan yang tepat terhadap mereka.

Terhadap anak yang melakukan perbuatan yang menyimpang, sikap yang ditunjukkan masyarakat dan pemerintah seringkali kurang arif. Anggapan atau stigma sebagai anak nakal atau penjahat seringkali diberikan kepada mereka, bahkan dalam proses peradilan, mereka kerap kali diperlakukan tidak adil. Sehingga yang terjadi adalah anak-anak pelaku kejahatan tersebut menjadi korban struktural dari para penegak hukum.

Beberapa produk perundang-undangan sebenarnya telah dibuat guna menjamin terlaksananya perlindungan hukum bagi anak. Misalnya, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak.

Mengingat anak dipandang sebagai subjek khusus dalam hukum, maka peraturan perundang-undangan tersebut memuat berbagai kekhususan tentang anak, yaitu kekhususan perlakuan hukum

terhadap anak baik sebagai korban maupun anak sebagai pelaku, baik dalam proses pengadilannya hingga pada penjatuhan sanksi yang dikenakan dan lembaga pemasyarakatnya.

Kekhususan-kekhususan tertentu mengenai cara memperlakukan anak-anak pelaku kejahatan dalam berbagai undang-undang, pada kenyataannya tidak menjamin tindakan para penegak hukum dalam memperlakukan anak pelaku kejahatan secara arif dan bijaksana dengan memperhatikan kondisi internal anak-anak dan pengaruh jangka panjang bagi masa depannya.

Dikatakan demikian, karena masih banyak penegak hukum yang kurang memperhatikan hak-hak anak pelaku tindak pidana. Mereka kerap kali memperlakukan mereka sama dengan pelaku yang sudah dewasa, semisal mereka diletakkan di Lembaga Pemasyarakatan yang sama dengan pelaku dewasa umumnya tanpa mempertimbangkan eksese-eksese negatif yang timbul dari tindakan tersebut.

Perlindungan terhadap anak pada hakikatnya tergantung pada pengaturannya dalam perundang-undangan dengan berbagai pertimbangan yang dapat menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak terutama hal-hal yang menyangkut perlindungan secara yuridis. Anak-anak merupakan golongan yang sangat rawan menyangkut pertumbuhan dan perkembangannya karena taraf perlindungan anak merupakan tolok ukur taraf peradaban masyarakat dan suatu bangsa.

Sehingga permasalahan terhadap anak harus diselesaikan secara simultan dan bersama-sama.

#### **4. Pemidanaan Terhadap Anak**

Dalam kaitannya dengan pengadilan pemberian sanksi terhadap anak, pemerintah mengatur mengenai pemberian sanksi pidana dan tindakan yang dapat dijatuhkan pada anak tersebut, pasal 22 Undang-undang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa : "terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan oleh peraturan ini".

Pasal 23 Undang-Undang tersebut dengan tegas menyebutkan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah :

##### **1). Pidana pokok**

Ada beberapa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal yaitu :

- a. Pidana Penjara
- b. Pidana Kurungan
- c. Pidana Denda
- d. Pidana Pengawasan

##### **2). Pidana Tambahan**

Selain pidana pokok maka terhadap anak nakal juga dapat dijatuhkan pidana tambahan yang berupa :

- a. Perampasan barang – barang tertentu, atau
- b. Pembayaran ganti rugi

Beberapa tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal dalam pasal 24 ayat (1) Undang – undang Pengadilan Anak adalah :

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh.
- b. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan pelatihan kerja, atau

- c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja

Selain tindakan tersebut, hakim juga dapat memberikan teguran dan menetapkan syarat tambahan. Teguran tersebut berupa peringatan dari hakim baik secara langsung terhadap anak yang dijatuhi tindakan maupun secara tidak langsung melalui orang tua, wali, atau orang tua asuh dari anak tersebut.

### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini Penulis mengalokasikan khususnya pada kantor Pengadilan Negeri Makassar. Dipilihnya lokasi penelitian ini atas dasar pertimbangan bahwa dimana Pengadilan Negeri Makassar sebagai tempat proses penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur ini dilaksanakan. Selain dari tempat tersebut di atas penulis juga akan melakukan penelitian di perpustakaan Fakultas Hukum Unhas, perpustakaan Pusat Unhas serta Perpustakaan Daerah Sulawesi Selatan.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber Data yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan cara menelaah berbagai literatur, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ada relevansinya dengan penulisan ini.



### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Data Primer, pengumpulan datanya dilakukan dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab dengan beberapa pihak yang terkait masalah yang penulis angkat.
2. Untuk Data Sekunder, pengumpulan datanya dilakukan dengan cara penelusuran dan menelaah buku serta dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan obyek penelitian, untuk dijadikan sebagai landasan teoritis.

### **D. Analisis Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini, baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian dilakukan secara deskriptif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Efektifitas Pidana Kurungan untuk menanggulangi Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak .**

Sebelum membahas lebih lanjut detail tentang efektifitas pidana kurungan untuk menanggulangi pidana yang dilakukan oleh anak maka terlebih dahulu penulis akan memaparkan tentang tujuan dari penerapan pidana kurungan terhadap anak.

Jenis- jenis pidana yang ada dalam suatu peraturan perundang2an yang di urutkan berdasarkan berat ringannya suatu pidana. Pasal 22 undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 menempatkan pidana kurungan di dlam kelompok pidana pokok pada urutan kedua yakni sesudah pidana penjara. Dalam pelaksanaannya pidana yang diatur sesuai dalam Pasal 27 undang-undangt Nomor 3 Tahun 1997 yang menjelaskan bahwa :

“ Pidana kurungan yang dapat di jatuhkan terhadap anak nakal paling banyak  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan orang dewasa. “

Dalam hal penjatuhan pidana, hakim juga harus memperhatikan prinsip nkepentingan terbaik bagi terdakwa khususnya terdakwa anak. Penjatuhan pidana/ pembedaan adalah sesuatu yang sangat penting meskipun KUHP tidak mengatur cara bagaimana hakim menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan dalam batas

maksimum dan minimum ancaman pidana yang tercantum dalam suatu peraturan.

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak. Yang mana tindak pidana anak merupakan tindak pidana yang khas apabila dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa pada umumnya mengingat sifat-sifat emosional anak masih belum stabil serta masih belum dapat membedakan perbuatan mana yang baik dan yang buruk oleh karena itu perlu ditangani secara khusus dalam rangka memberikan perlindungan dan kesejahteraan anak.

Menurut Made Sadhi Astuti (1997 :4 ) yang mengemukakan bahwa :

Salah satu aspek yang terkait dalam peranan hakim dalam peradilan pidana adalah terkait dengan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak, untuk itu hakim dalam memutus perkara pidana anak perlu mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakanginya termasuk masa lalu si anak, sehingga dalam hal ini hakim harus benar-benar bijaksana dalam bertindak untuk itu dibutuhkan pengetahuan yang luas dan mendalam bagi seorang hakim agar putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan keadilan, terhindar dari kesewenang-wenangan dan sesuai dengan kebutuhan anak.

Hakim dalam memutus perkara pidana anak selain harus memperhatikan aspek-aspek yuridis juga harus memperhatikan aspek non yuridis sebagai bahan pertimbangan hakim dalam

pembuatan suatu keputusan khususnya yang berhubungan dengan pertanggung jawaban pidana, jenis pidana dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap anak. Adapun aspek non yuridis yaitu aspek sosiologi, psikologis, kriminologis dimana ketiga aspek yang saling terkait yang membantu hakim untuk menganalisa secara obyektif dan realistis

Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial mengapa seorang anak melakukan suatu tindak pidana, aspek psikologis berguna untuk mengkaji kondisi psikologis anak pada saat anak melakukan suatu tindak pidana dan setelah menjalani pidana sedangkan aspek kriminologi diperlukan untuk mengkaji sebab-sebab seorang anak melakukan tindak pidana dan bagaimana sikap serta perilaku anak yang melakukan tindak pidana, dengan demikian hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang adil sesuai dengan kebutuhan anak.

Menurut Moeljatno (2002 : 32 – 33) terkait dengan penjatuhan pidana oleh hakim maka hakim hendaknya harus memperhatikan beberapa aspek yakni :

- a. Melindungi masyarakat dari perbuatan yang merugikan dengan menyelidiki secara teliti apakah suatu perbuatan betul-betul merupakan suatu tindak pidana dan merugikan.
- b. Melindungi dan memperhatikan hak-hak terdakwa dan menginsyafkan dari perbuatan yang keliru.

Untuk memberikan jenis pidana yang sesuai bagi anak maka hendaknya hakim harus memperhatikan beberapa hal yaitu :

1. Keadaan dan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan
2. Keadaan dan kebutuhan fisik serta kejiwaan anak.
3. Keadaan dan kebutuhan masyarakat.

Pidana kurungan merupakan bagian dari penegakan hukum pidana terhadap anak sebagai konsekuensi atas tindak pidana yang dilakukan dan dalam penjatuhan putusan pidana kurungan sepenuhnya menjadi kewenangan hakim. Adapun yang menjadi dasar-dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kurungan terhadap anak menurut Made Sadhi Astuti (1997 : 117) adalah :

1. Anak tersebut melakukan tindak pidana tidak lebih dari 1 kali ;
2. Anak tersebut melakukan suatu tindak pidana yang tergolong dalam kejahatan ringan.;
3. Dipandang bahwa anak tersebut masih dapat di perbaiki.

Penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan tetap menjadi posisi sentral dalam stelsel saksi pidana, sekalipun telah diadakan usaha-usaha pembaruan dan perbaikan baik yang bersifat praktis maupun teoritis untuk mengurangi daya laku dari pidana perampasan kemerdekaan namun dalam praktik di lapangan, walaupun anak tersebut baru pertama kalinya melakukan tindak pidana dimana hal

tersebut di pandang sebagai usaha untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi.

Alf Ross (<http://elfamurdiana.blogspot.com/2009-02-01-archive.html>) dalam concept of punishment juga berpendapat bahwa “Punishment suffering upon the person, upon whom it is imposed. The punishment is an expression of disapproval of the action for which it is imposed” pemikiran tersebut mengatakan mengenai penitensi pidana penjara/kurungan dengan asumsi bahwa sesungguhnya pidana penjara/kurungan hanyalah di tunjukkan pada pengenaan penderitaan terhadap yang bersangkutan dan sebagai pernyataan pencelaan terhadap perbuatan sipelaku.

Walaupun memang pada awalnya penjatuan pidana terhadap anak didasarkan pada suatu pemikiran bahwa anak yang berusia 10-12 tahun dianggap tidak mampu untuk mempertanggung jawabkan sedangkan 13-16 tahun di pandang mampu untuk bertanggung jawab dimana hal tersebut dapat di ukur dari apakah anak tersebut mampu menilai dan menyadari akan perbuatannya dan apakah anak tersebut pengetahuan yang tepat mengenai baik dan buruk.

Dalam perkembangan hukum pidana khususnya terkait dengan penjatuan pidana terhadap anak hendaklah memiliki landasan *Doelmatigheid* kegunaan dan *Rechtmatigheid* (landasan hukumnya) sehingga perlumendapatkan tempat yang layak agar dapat memenuhi tuntutan rasa keadilan masyarakat sekalipun masih dalam upaya

kerja keras baik dari pemerintah, kalangan akademisi, organisasi masyarakat maupun tokoh masyarakat untuk menemukan solusi terbaik tanpa mengabaikan kebijakan dan keputusan-keputusan kongres internasional yang ada.

Penjatuan pidana kurungan menimbulkan dampak negatif dan kerugian khususnya terhadap terpidana anak, menurut Topo Santoso, Eva Achjani (2003:98) bahwa adapun dampak dari penjatuan pidana perampasan kemerdekaan diantaranya adalah :

1. Anak akan terpisah dari keluarganya sehingga akan berdampak pada gangguan terhadap gangguan hubungan keluarga seperti terlalu singkatnya dalam memberikan pendidikan, pengarahan, bimbingan yang positif dari orang tua terhadap terpidana anak.
2. Anak menjadi lebih ahli tentang kejahatan, Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh yang didapat dari terpidana lainnya dimana hal ini membuka kemungkinan bagi terpidana untuk mempelajari perilaku kriminal terpidana yang lainnya sehingga anak akan menjadi lebih ahli tentang kejahatan.
3. Anak tersebut diberi cap oleh masyarakat, hal ini dapat kita kaitkan dengan teori labeling yang dikemukakan oleh Matza dimana memandang para kriminal bukanlah sebagai orang yang bersifat jahat tetapi mereka adalah individu-individu yang sebelumnya pernah berstatus jahat.

4. Masyarakat menolak kehadiran mantan terpidana anak, terkait dengan stigma yang diberikan masyarakat dimana anak yang pernah menjalani hukuman penjara maka anak tersebut tetap disebut sebagai anak yang nakal dan memiliki peringai buruk sehingga masyarakat menolak kehadirannya sebab masyarakat khawatir kalau anak tersebut akan mengulangi kejahatan sama dan akan memberikan pelajaran yang tidak baik terhadap anak-anak yang lain padahal belum tentu demikian adanya.

5. Masa depan anak menjadi lebih suram.

Pada kenyataannya anak yang telah di jatuhkan pidana penjara/kurungan mereka justru akan melakukan kembali tindak pidana, maka dari sini dapat dikatakan bahwa ternyata penjatuhan pidana penjara tidaklah efektif dalam upaya menanggulangi kejahatan yang terjadi tetapi justru menimbulkan dampak-dampak yang merugikan anak.

Melihat begitu besarnya kerugian dan dampak negatif yang ditimbulkan, maka hendaklah di cari dan di rumuskan alternatif dari pidana kurungan terhadap anak sebagai pelaku kejahatan misalnya dengan memberikan pembinaan yang bersifat noninstitusional seperti halnya yang disebutkan dalam The Beijing Rules pada Rule 18 mengenai macam-macam tindakan yang dapat di jatuhkan pada terpidana anak adalah :

- Pidana pengawasan



- Pengawasan (Probation), kerja social (community Service order), pidana denda atau ganti rugi (Compensation, restitution).
- Berpartisipasi dalam kegiatan kelompok konseling dan kegiatan lain serupa (orders to participate in group counseling and similar activities)
- Membantu perkembangan dalam masyarakat atau dalam lingkungan yang mendidik (orders concerning foster care, living communication or other educational setting )
- Tindakan-tindakan lain yang relevan ( other relevant orders).

Barda Nawawi A. (1997 : 91) mengemukakan bahwa :

Pemberian pidana akan benar-benar dapat terwujud dan di rencanakan melalui beberapa tahap yaitu :

1. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang
2. Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang dan
3. Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksanaan yang  
berwenang.

Tahap pertama sering juga di sebut tahap “ pemberian pidana in abstracto” sedangkan tahap kedua dan ketiga di sebut tahap “ pemberian pidana in concreto”

Dalam rangka mewujudkan tercapainya rasa keadilan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat, maka hakim harus mempertimbangkan/ pedoman pemidanaan dalam menjatuhkan pidana antara lain :

1. Kesalahan pelaku tindak pidana;
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
3. Cara melakukan tindak pidana
4. Sikap batin perilaku tindak pidana
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana
6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
9. Pengaruh tindak terhadap korban atau keluarga korban; dan atau
10. Apakah tindak pidana dilakukan secara berencana

Hakim merupakan satu bagian yang terdapat dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang memiliki tujuan dan peranan aktif pada setiap tahap dan proses persidangan.

Menurut Romli Atmasasmita (1995 : 15), tujuan dan peranan hakim dapat diartikan juga merupakan suatu tujuan dari sistem peradilan pidana itu sendiri

Untuk mempertegas hal-hal di atas berikut penulis lampirkan beberapa data hasil penelitian penulis pengadilan Negeri Makassar

dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yakni tentang jenis sanksi dan penerapannya terhadap pelaku tindak pidana dalam hal ini anak terhitung mulai tahun 2008-2011

Tabel 1  
Perkara anak Tahun 2008-2011  
Di Pengadilan Negeri Makassar

Tahun	Jumlah terpidana anak	Sanksi Pidana terhadap Anak		
		alternatif	kumulatif	Penjara
2008	115 anak dari 102 perkara	44 anak	14 anak	53 anak
2009	235 anak dari 198 perkara	25 anak	12 anak	191 anak
2010	176 anak dari 154 perkara	76 anak	22 anak	76 anak
2011	176 anak dari 154 perkara	48 anak	28 anak	77 anak
Total	702 anak dari 604 perkara	193 anak	76 anak	397 anak

Sumber : data Pengadilan Negeri Makassar 2008-2011

Pada tabel di atas di terangkan tentang jumlah penanganan tindak pidana yang di lakukan 2008-2011 totalnya berjumlah 702 pelaku anak dari total 604 perkara dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, dengan rincian masing-masing yaitu pada tahun 2008 dari 115 anak pelaku tindak pidana 44 anak di antaranya mendapat sanksi pidana alternatif, 14 anak terkena sanksi kumulatif dan 53 anak pelaku sisanya dikenakan sanksi kurungan penjara. Pada tahun

2009 dari total 235 anak pelaku tindak pidana 25 anak di antaranya dikenakan sanksi pidana alternati, 12 anak terkena sanksikomulatif dan 191 anak di jatuhi hukuman penjara.. pada tahun 2010 dengan jumlah 176 pelaku tindak pidana 76 diantaranya dikenakan sanksi pidana alternatif.

Pada data di atas menunjukkan bahwa dalam hal pengambilan keputusan hakim, lebih menekankan pada penjatuhan pidana kurungan dan penjara, itu tampak jelas bahwa dari 702 pelaku tindak pidana oleh anak sepanjang tahun 2008-2011, sekitar 666 anak diantaranya dikenakan sanksi kurungan dan penjara. Namun hal tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan, jumlah pelaku anak tidaklah berkurang akan tetapi tiap tahunnya mengalami peningkatan. Ini menjadi bukti bahwa penerapan sanksi kurungan dan penjara tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

Bertolak dari itu hakim sebagai penentu akan besar tidaknya seseorang dan sanksi pidana apa yang sesuai diberikan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana, harus mewujudkan tujuan pemidanaan, yaitu menjamin kelangsungan hidup masyarakat dan untuk mencegah orang dari melakukan kejahatan.

Pada sidang pengadilan anak, di dalam menjatuhkan pidananya hakim harus memiliki sikap sebagaimana di tetapkan pasal 59 ayat (1)

1. Memberi kesempatan pada orang tua, wali atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal yang bermanfaat bagi anak sebelum mengucapkan keputusannya.

2. Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemsyarakatan dari pembimbing kemsyarakatan.
3. Putusan pengadilan wajib mengucapkan dalm sidang terbuka untuk umum.

Sebagaimana diketahui, bahwa selama persidangan dilansungkan, orang tua, wali, atau orang tua asuh mengikuti jalannya sidan, oleh karena itu, undang-undang memandang ada baiknya sebelum putusan mereka di beri kesempatan untuk mngemukakan keterangan yang bermanfaat bagi anak (terdakwa), yang berarti perannya ikut diperhatikan dipersidangan.

Menurut Gatot Supramono (1998 : 84 ) :

Meskipun keterangan yang dibuatnya itu secara yuridis tidak mengikat hakim, akan tetapi keterangan tersebut dapat di pakai sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan bagi hakim.

Begitu juga terhadap keputusan yang dimaksud dalam pasal 59 pada ayat (1) undang-undang no. 3 Tahun 1997 maka sebelum putusan itu di jatuhkan, hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemsyarakatan yang mana petugas pembimbing masyarakat di tentukan oleh departemen kehakiman.

Bertolak dari itu maka hakim di dalam menjatuhkan pidana haruslah memperhatikan hal-hal yang di anggap penting dikarenakan pelakunya adalah anak-anak yang berbeda dengan orang dewasa.

Menurut Barda Nawawi (1997 : 18) bahwa :

Di Inggris antara lain ada ketentuan bahwa dalam perkara yang menyangkut anak di bawah umur 14 tahun, orang tuanya atau walinya dapat di perhatikan untuk membayar denda yang dijatuhkan kepada anak itu, kecuali pengadilan yakin bahwa orang tua atau walinya itu tidak dapat dipersalahkan.

Lanjut Barda Nawawi (1997 : 18 ) yang mengemukakan bahwa :

“ Demikian pula di Singapura, ada ketentuan bahwa pengadilan dapat memerintahkan agar denda, kerusakan-kerusakan atau ongkos di bayar boleh orang tua atau wali dari seorang anak atau remaja, kecuali pengadilan berpendapat bahwa orang tua walinya itu tidak dapat dipersalahkan atau tidak menyebabkan terjadinya pelanggaran.”

Sama halnya dengan orang dewasa, anak dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya mempunyai hak yang sama dalam setiap aspek kehidupan, baik itu aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan hukum.

Meskipun pada prinsipnya kedudukan anak dan orang dewasa sebagai manusia adalah sama di mata hukum, namun hukum juga meletakkan anak pada posisi yang istimewa, artinya ketentuan-ketentuan hukum yang berlakukannya kepada orang dewasa.

Untuk mengukur sejauh mana keefektifan pidana kurungan, maka penulis terlebih dahulu akan memaparkan 2 macam pidana kurungan, yakni pertama pidana kurungan prinsipil yang lamanya minimum 1 hari

dan maksimum 1 tahun yang kedua yakni pidana kurungan subsidair atau di kenal sebagai pidana kurungan pengganti denda, yang lamanya minimum 1 hari dan maksimum 6 bulan.

Untuk melengkapi penjelasan di atas maka penulis memaparkan data tentang hasil penanganan perkara di pengadilan negeri makassar dalam kurun waktu 4 tahun terakhir mulai tahun 2008-2011.

Tabel 2  
Perkara anak Tahun 2008-2011  
Di Pengadilan Negeri Makassar

Tahun	Jumlah terpidana Anak	Sanksi Pidar Terhadap Anak			
		Kurungan subsidair	Kurungan Prinsipil	Dikembalikan ke orang tua/Dinas sosial	Penjara
2008	115 anak	14 anak	-	4 anak	97 anak
2009	235 anak	12 anak	-	7 anak	216 anak
2010	176 anak	22 anak	-	2 anak	152 anak
2011	176 anak	28 anak	-	23 anak	125 anak
Total	702 anak	76 anak	-	36 anak	590 anak

Sumber ; Data Perkara Pidana anak Pengadilan Negeri klas 1A Makassar  
tahun 2008 – 2011

Pada tabel di atas diterangkan tentang jumlah penanganan tindak pidana yang di lakukan oleh anak dari tahun 2008-2011 totalnya

berjumlah 702 pelaku anak dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, dengan rincian masing-masing yaitu pada tahun 2008 dari 115 anak pelaku tindak pidana 14 anak di antaranya mendapat sanksi pidana kurungan subsidair, 4 anak masing-masing 2 anak di kembalikan ke orang tua dan dua di antaranya menjadi anak negara dan dititip di panti dinas sosial, dan 92 anak sisanya dikenakan sanksi kurungan penjara.

Pada tahun 2009 dari total 235 anak pelaku tindak pidana 12 anak diantaranya dikenakan sanksi pidana kurungan subsidair, 7 anak masing-masing 3 orang dikembalikan ke orang tua dan di antaranya dititipkan di panti dinas sosial dan 216 anak di jatuhkan hukuman penjara.

Pada tahun 2010 dengan jumlah 176 anak pelaku tindak pidana 22 diantaranya 2 anak yang masing-masing 1 dikembalikan ke orang tua dan 1 lagi di anak. titipkan di panti dinas sosial. Dan 152 di jatuhkan pidana penjara.

Pada tahun 2011 dengan jumlah 176 pelaku tindak pidana 28 di antaranya dikenakan sanksi pidana kurungan subsidair, 23 anak yang masing-masing 8 di kembalikan ke orang tua dan dititipkan di panti dinas sosial dan 125 anak di jatuhkan pidana penjara.

Berdasarkan hasil penelitian 15 anak dan pemaparan tentang data di atas pada kenyataannya penerapan pidana kurungan yang ada saat ini hanya berupa sanksi pidana kurungan subsidair atau yang sifatnya hanya berupa pidana kurungan pengganti denda. Menurut hemat penulis, aturan



tentang penerapan sanksi pidana kurungan yang sifatnya prinsipian hanya di atur dalam buku KUHP pidana yakni pelanggaran.

Diluar dari bagaimana sistem penerapan pidana terhadap anak dalam hal ini pidana kurungan prinsipian dan subsidair hal yang teramat penting adalah bagaiman mewujudkan perlindungan bagi anak yang adil dalam suatu masyarakat. Asumsi ini ini diperkuat engan pendapat Age (Arief Gosita 1985 : 1), yang telah mengemukakan dengan tepat bahwa “ melindungi anak pada hakekatnya melindungi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara di msa depan “. Dari ungkapan ini tersebut naampak betapa pentingnya upaya perlindungan anak demi kelansungan masa depan sebuah komunitas yang baik komunitas terkecil yaitu kelurga, maupun komunitas yang terbesar yaitu negara. Artinya, dengan mengupayakan perlindungan bagi anak komunitas-komunitas tersebut tidak hanya telah menegakkan hak-hak anak, tapi juga sekaligus menanamkan investasi untuk kehidupan mereka dimasa yang akan datang.

Lebih lanjut Arief Gosita (1985 :14) mengemukakan bahwa :  
Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang menmungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif. Ini berarti di lindunginya anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya tuk hidup, mempunyai kelnsungan hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan dalam

pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya,.

Menurut Arief Gosita (1985 : 6 ) pada umumnya, upaya perlindungan anak dapat di bagi menjadi perlindungan langsung dan tidak langsung, dan perlindungan yuridis dan non yuridis yaitu :

Upaya-upaya perlindungan secara langsung di antaranya meliputi: pengadaan sesuatu agar anak terlindungi dan diselamatkan dari sesuatu yang membahayakannya, pencegahan dari segala sesuatu yang membahayakanny, pencegahandari segalasesuatu yang bmerugikan atau megorbankana anak, pengawasan, penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya atau dari luar dirinya, pembinaan (mental, fisik, sosial), pemasyarakatan pendidikan formal dan informal, pengasuhan (asih, asah, asuih )sedangkan upaya perlindungan tidak langsung antara lain meliputi pencegahan orang lain merugikan, mengorbankan kepentingan anak melalui suatu peraturan perundang-undangan.

Kedua upaya perlindungan di atas sekilas nampak sama dalam hal bentuk upaya perlindungannya. Perbedaan antara keduanya terletak pada objek dari perlkindungan itu sendiri. Objek dalam upaya perlindungan langsung tentunya adalah anak secar langsung. Lebih pada para partisipan yang berkaitan dan berkepentingan terhadap perlindungan anak yaitu orang tua, petugas, dan pembina.

Demi menimbulkan hasil yang optimal, seyogyanya upaya perlindungan ini di tempuh dari dua jalur, yaitu dari jalur pembinaan para partisipan yang berkepentingan dalam perlindungan anak, kemudian selanjutnya pembinaan anak secara tidak langsung oleh para partisipan tersebut.

Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana dapat pula ditinjau dari 3 perspektif yakni KUHP, undang-undang no. 3 Tahun 1997 dan The Beijing Rules. Dalam peradilan pidana (Juvenile justice) merupakan salah satu bentuk perlindungan yang di berikan hukum kepada anak yang telah melakukan tindak pidana. Orientasi dari keseluruhan proses peradilan pidana anak ini harus ditujukan dari keseluruhan proses peradilan.( the best interest for children).

Barda Nawawi Arief (1996 : 13)

Sedapat mungkin sanksi pidana, terutamapidana penjara harus dipandang sebagai the last resort dalam peradilan anak seperti yang telah di tegaskan dalam resolusi PBB 45/113

Sebagai subjek hukum yang di pandang khusus oleh hukum, maka proses perlindungan hukum terhadap anak dalam peradilan anak memerlukan perlakuan dan jamina-jaminan khusus ini tentunya tidak mengesampingkan jamina-jaminan umum yang berlaku bagi setiap orang.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Bahwa keseluruhan perlindungan terhadap anak, dalam hal ini sebagai pelakutindak pidana, seyogyanya di mulai dari ketentuan-ketentuan hulum yang seoptimal

mungkin menjamin hak-hak anak. Dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar perlindungan anak yang berlaku universal, yaitu a. non diskriminasi, b. kepentingan terbaik bagi anak, c. hak untuk hidup, d. kelangsungan hidup dan perkembangan dan d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam lingkup nasional, jaminan hukum secara khusus yang diberikan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana di atur dalam undang-undang no. 3 tahun 1997 tentang peradilan anak. Sedangkan, secara Internasional di atur oleh The Beijing Rules.

Sebagai peraturan yang secara khusus mengatur perlakuan dan jaminan-jaminan khusus bagi anak yang melakukan tindak pidana, pada kenyataannya substansi undang-undang peradilan anak tersebut belum cukup memberikan jaminan perlindungan. Dalam hal ini, terhadap beberapa ketentuan yang konsistensi dengan peraturan induknya (KUHP) dan undang-undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana dalam hal ini pidana terhadap anak, yang menjadi tolak ukur efektif tidaknya adalah anak pelaku tindak pidana akan jera dan tidak akan melakukan tindakan yang sama atau tindak pidana lainnya yang akan menjerat anak untuk bermasalah dengan hukum kembali namun, melihat fakta bahwa banyak anak yang di bina dalam LAPAS beresiko mengalami prisonisasi, yang berindikasi bahwa anak yang setelah di bina di LAPAS lebih nakal ketimbang anak sebelum di bina di LAPAS.

Widodo (2013 : 9) mengemukakan bahwa :

Resiko sifat keabnormalan anak akan bertambah parah jika menilik fakta bahwa pada tahap pasca adjukasi yaitu pelayanan anak setelah di vonis pengadilan, terhadap beberapa situasi yang sering di hadapi anak didik pemasyarakatan adalah seperti pencampuran antara ank dengan narapidanan dewasa, kepadatan hunian lembaga kemasyarakatan yang menghambat proses pembinaan dan integrasi bagi anak didik kerentanan terhadap pelanggaran hak sebagai anak didik serta haknya sebagai anak.

Ini menjadi sebuah bukti bahwa penerapan sanksi pidana kurungan ataupun penjara bagi anak bukanlah sebuah solusi terbaik melainkan sebuah tahapan atau proses anak untuk belajar lebih banyak lagi tentang kejahatan yang tak menutup kemungkinan anak jadi akan meimplementasikan pengetahuan yang dia dapatkan tadi dalam kehidupannya setelah bebas.

## **B. Faktor Penghambat Penjatuhan Pidana Kurungan Dalam Rangka Menanggulangi Tindak Pidana Anak.**

Penjatuhan pidana kurungan adalah suatu cara metode tertentu yang ditempuh untuk memberika efek jera kepada anak yang melakukan tindak pidana agar tidak melakukan tindak kejahatan untuk kedua kalinya.

Pidana kurungan konsepsinya memang mirip dengan pidana penjara hanya saja dalam proses pelaksanaannya sistem pelaksanaan hukumannya jauh lebih ringan adapun perbedaannya yaitu :

1.

1. Hukuman penjara dapat dijalankan di dalam penjara dimana saja sedangkan hukuman kurungan dilaksanakan di daerah tempat berhukum bertempat tinggal pada waktu hukuman di jatuhkan.

2. Pekerjaan yang diberikan kepada terpidana kurungan lebih ringan daripada pekerjaan yang harus dijalankan oleh terpidana di penjara.

3. Terpidana kurungan mempunyai hak pistole,. Hak istole adalah suatu hak terpidana untuk memperbaiki kehidupannya di dalam lembaga dengan biaya sendiri.

Jadi selain upaya preventif dan tindakan penghukuman harusnya di lakukan upaya lain yakni Kuratif atau suatu upaya menyembuhkanakalan anak, bentuk-bentuk tindakan kuratif adalah :

- a. Menghilangkan semua sebab-sebab timbulnya kejahatan.
- b. Melakukan perubahan lingkungan dengan jalan mencarikan orang tua asuh dan memberikan fasilitas yang diperlukan bagi perkembangan jasmana dan rohani yang sehat bagi anak.
- c. Memindahkan anak-anak nakal sekolah yang lebih baik atau letengah lingkungan sosial yang baik.
- d. Memberikan latihan bagi remaja secara teratur tertib dan disiplin.
- e. Memanfaatkan waktu senggang di camp peltihan untuk membiasakan diri bekerja belajar dan membiasakn hidup sehat.
- f. Menggiatkan organisasi pemuda dengan program-porgram latihan untuk mempersiapkan anak remaja delikuen bagi pasaran kerja dan hidup ditengah masyarakat.

- g. Mendirikan klinik psikologi untuk meringankan dan memecahkan konflik emosional dan gangguan kejiwaan lainnya.

Adapun kendala lain penjatuhan sanksi pidana kurungan terhadap anak menurut penulis adalah akan munculnya paradigma negatif dari masyarakat terhadap anak yang telah menjalani pidana kurungan yang kecenderungannya mereka akan memberikan perlakuan berbeda atau menurut penulis masyarakat secara tidak langsung memberikan sanksi sosial terhadap anak atau prasangka sosial.

Menurut DR. W. A Gerungan, Dipl, Psych. (2010 : 180 ) mengemukakan bahwa :

Prasangka sosial merupakan sikap perasaan orang-orang terhadap golongan manusia tertentu, golongan rasa tau kebudayaan yang berbeda dengan golongan orang yang berprasangka itu. Prasangka sosial terdiri atas attitude sosial yang negatif itu lambat laun menyatakan dirinya dalam tindakan-tindakan diskriminatif.

Gejala-gejala dan peristiwa-peristiwa yang bercorak tindakan-tindakan diskriminatif terhadap golongan manusia tanpa terdapat alasan-alasan yang objektif pada pribadi-pribadi orang yang berbuat demikian. Adanya prasangka sosial ini dapat di tunjukkan pada berbagai masyarakat mereka di dunia (dalam masyarakat colonial, prasangka sosial itu sudah mendarah daging dimana kaum yang di jajah demi kelangsungan penjajahannya ).

Bahwasanya tindakan-tindakan diskriminatif yang berdasarkan prasangka-prasangka sosial yang merugikan masyarakat itu sendiri.

Sudah jelas pula karena dengan demikian perkembangan potensi-potensi masyarakat tu sendiri sangat menghambat. Maka, di negara-negara yang bersangkutan telah pula di upayakan untuk mengubah dan menghilangkan prasangka-prasangka sosial yang picik dan yang menghambat perkembangan masyarakat dengan wajar.

Adapun yang menjad dasar pertimbangan sehingga menjadi faktor penghambat penjatuhan pidana kurungan adalah timbulnya dampak negatif dan kerugian khususnya terhadap terpidana anak.

Adapun dampak dari penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan diantaranya adalah :

- Anak akan terpisah dari keluarganya sehingga akan berdampak pada gangguan hubungan keluarga seperti terlalu singkatnya dalam memberikan pendidikan pengarahan bimbingan positif dari orang tua terhadap terpidana anak.
- Anak menjadi lebih ahli tentang kejahatan hal ini dikarenakan adanya pengarang yang didapat dari terpidana lainnya dimana hal ini membuka kemungkinan bag terpidana untuk mempelajari perilaku kriminal terpidana yang lainnya sehingga akan menjadi lebih ahli tentang kejahatan.
- Anak tersebut di beri cap oleh masyarakat, hal ini dapat kita kaitkan dengan teori labeling yang dikemukakan oleh Marza dimns memandang para kriminal bukanlah sebagai orang yang bersifat



jahat tetapi mereka adalah individu-individu yang sebelumnya pernah berstatus jahat.

- Masyarakat menolak kehadiran mantan terpidana anak, terkait dengan stigma yang diberikan masyarakat dimana anak yang pernah menjalani hukuman penjara maka anak tersebut tetap disebut menjadi anak yang nakal dan memiliki peringai buruk sehingga masyarakat menolak kehadirannya sebab masyarakat khawatir kalau anak tersebut akan mengulangi kejahatan yang sama dan akan memberikan pelajaran yang tidak baik terhadap anak-anak yang lain
- Masa depan anak menjadi lebih suram.

Dan pada kenyataannya anak yang telah dijatuhi pidana penjara atau kurungan mereka justru tidak menjadi lebih baik dari sebelumnya tetapi justru akan kembali tindak pidana, maka dari sini dapat dikatakan bahwa ternyata penjatuhan pidana penjara tidaklah efektif dalam upaya menanggulangi kejahatan yang ytrejadi tetapi justru menimbulkan dampak-dampak yang merugikan bagi anak.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN.**

Dari uraian di atas maka dapat di tarik beberapa kesimpulan terkait dengan permasalahan yang dikaji yakni :

**1. Pada kenyataannya penerapan bahwa pidana kurungan sendiri dapat dikatakan efektif namun dalam hal sebagai pidana pengganti.**

Denda (subsidiar), sedangkan dalam hal pidana kurungan sebagai sanksi pidana yang sifatnya primer tidaklah begitu efektif hal ini dikarenakan sanksi pidana untuk pelanggaran dan realitasnya dalam setiap pelanggaran yang dilakukan diterapkan adalah sanksi pidana denda sebagai pengganti pidana kurungan. Selain itu penjatuan pidana penjara/kurungan terhadap anak menimbulkan dampak negatif dan kerugian khususnya terhadap terpidana anak, yaitu :

- a. Anak akan terpisah dari keluarganya
- b. Anak menjadi lebih ahli tentang kejahatan
- c. Anak tersebut di beri cap oleh masyarakat.
- d. Masyarakat menolak kehadiran mantan terpidana anak masa depan anak menjadi lebih suram.

**2. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan sehingga menjadi faktor penghambat penjatuan pidana kurungan adalah timbulnya dampak negatif dan kerugian khususnya terhadap terpidana anak, adapun dampak dari penjatuan pidana perampasan kemerdekaan diantaranya adalah :**

- a. Anak akan terpisah dari keluarganya sehingga akan berdampak pada gangguan terhadap hubungan keluarga seperti terlalu singkatnya dalam mmebrtikan pendidikan, pengarahan, bimbingan yang positif dari orang tua terhadap terpidana anak.
- b. Anak menjadi lebih ahli tentang kejahatan, hal ini dikarenakan adanya pengaruh yang didapat dari terpidana lainnya untuk mempelajari perilaku kriminal terpidana yang lainnya sehingga anak akan menjadi lebih ahli kejahatan.
- c. Anak tersebut lebih cap oleh masyarakat hal ini dapat dikaitkan dengan teori ;labeling yang dikemukakan oleh Matza dimana memandang para kriminal bukanlah sebagai orang yang bersifat jahat tetapi mereka adalah individu-individu yang sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai pemberian sistem peralihan pidana maupun masyarakat luas.
- d. Masyarakat menolak kehadiran mantan terpidana anak, terkait dengan stigma yang diberikan masyarakat dimana anak yang pernah menjalani hukuman penjara maka anak tersebut tetap disebut sebagai anak yang nakal dan memiliki peringai buruk sehingga masyarakat menolak kehadirannya sebab masyarakat khawatir kalau anak tersebut akan mengiulangi kejahatan yang sama dan akan memberikan pelajaran yang tidak baik terhadap anak-anak yang lain, padahal belum tentu demikian adanya.
- e. Masa depan anak akan menjadi lebih suram.

## **B. Saran-saran**

Mengingat buruknya dampak yang timbulkan dari pemberian pidana terhadap anak maka hendaknya perlu diadakan perubahan terhadap jenis pidana yang diberikan pada terpidana anak dimana pidana tersebut harus tetap memperhatikan tujuan utama dan dasar dari peradilan anak yakni untuk memberikan perlindungan dan mewujudkan kesejahteraan anak serta mencegah pengulangan atas tindak pidana yang dilakukan.

Pemberian jenis pidana yang tidak bersifat penghukuman dan perampasan terhadap kemerdekaan anak merupakan alternatif pidana yang dapat dijatuhkan pada terpidana anak seperti pidana pengawasan, pembinaan, percobaan, denda, ganti rugi, kerja sosial, maupun permohonan maaf dan teguran dengan demikian akan tercapai tujuan pemidanaan dalam menanggulangi kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, 1983, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Cetakan Ketiga  
PT. Grafindo Persada.
- Abidin, H. A. Zainal. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ali, Ahmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum : suatu kajian filosofos dan  
sosiologis*. Jakarta : Gunung Agung
- Dirdjosisworo, soedjono. 1974. Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002  
Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam  
Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat. Bandung
- Effendy, Rusli, 1989, *Teori Hukum*, Ujung Pandang : Hasanuddin  
University Press.
- Gosita, Arif, 1985, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : Akademika  
Presindo.
- Gultom, Maidin. 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung :  
PT. Rafika Aditama.
- ....., 2010, *Perlindungan Hukum terhadap anak dalam sistem  
peradilan anak indonesia*, Bandung : PT. Rafika Aditama.
- Hamzah, Andi. 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta  
: Pradya Paramitha.
- Hasan, Wadong Maulana, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*,  
Jakarta : PT. Grafindo Indonesia.

**Kusumaatmadja, Mochtar dan Sunaryati Hartono. 1994. *Penelitian Hukum di Akhir Abad 20, Alumni, Bandung.***

Mulyadi, Lilik. 2005. *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik.* Bandung: Alumni

Nashriana, 2011. *Perlindungan Hukum Anak*, Jakarta : Akademika Prasindo.

Nawawi Arif, Barda. 1997 *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju.

Poerwodarminto, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

Soeroso, *Tata Cara dan Proses Persidangan*, Jakarta, Sinar Grafika, 1993.

Schaffmeister, D., N.Keijzer dan E. Ph.Sutorius. 1995. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty.

....., (et.al.), *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1995).

Suparni, niniek. 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika.

## **Makalah**

Lokman, loebby, 1992. *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Pidana Denda*. Jakarta : BPHN Dep.Keh.RI

Pohan agustinus, 2002. *Makalah dalam diskusi kajian undang-undang nomor 3 tahun 1997.*

### **Peraturan-peraturan**

Kitab undang-Undang Hukum dan Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

### **Sumber lainnya :**

[www.KamusBahasaIndonesia.org](http://www.KamusBahasaIndonesia.org) ,

website . Konvensi, *Media Advokasi dan Penegakan Hak-Hak Anak*. Volume II No.2, 1998 : 3

[http://usupress.usu.ac.id/files/Trafiking\\_finish\\_normal\\_bab%201.pdf](http://usupress.usu.ac.id/files/Trafiking_finish_normal_bab%201.pdf)